

Penguatan Peran Sektor Keuangan bagi Percepatan Pemerataan Kesejahteraan Lokot Zein Nasution



Lokot Zein Nasution; Peneliti pada Pusat Kebijakan Sektor Keuangan (PKSK), Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kementerian Keuangan RI.

ARTICLE INFO

Article history:

Received 2021-01-17

Received in revised form 2021-01-17

Accepted 2021-02-25

Kata kunci:

Kemiskinan dan
Ketimpangan, Peran Sektor
Keuangan, Pemerataan
Kesejahteraan.

Keywords:

Poverty and Inequality, Role
of Financial Sector, Equitable
Welfare.

How to cite item:

Lokot Zein Nasution.
(2021). Penguatan Peran
Sektor Keuangan bagi
Percepatan Pemerataan
Kesejahteraan.
*Journal of Regional
Economics Indonesia*, 2(1).

Abstrak

Kebijakan untuk mengoptimalkan peranan sektor keuangan bagi penurunan angka kemiskinan dan ketimpangan seringkali kurang berhasil. Hal ini diakibatkan oleh lemahnya daya analisis untuk memetakan akar masalah penyebab kemiskinan. Padahal, peranan sektor keuangan sangat dibutuhkan dalam menyediakan aksesibilitas jasa layanan keuangan terutama kepada masyarakat miskin. Mengoptimalkan peran sektor keuangan dalam menciptakan model keuangan yang inklusif diyakini mampu menciptakan pemerataan kesejahteraan yang bisa bertahan dalam jangka panjang. Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana mekanisme untuk mengoptimalkan peranan sektor keuangan dalam mempercepat pemerataan kesejahteraan. Berdasarkan metode literature review, hasil beragam studi empiris menemukan bahwa optimalisasi peranan sektor keuangan harus bisa mengkonstruksi akar masalah penyebab kedalaman dan keparahan kemiskinan. Strategi yang bisa dikembangkan adalah meningkatkan edukasi dan literasi keuangan di perdesaan, menciptakan ekosistem keuangan yang kondusif, dukungan politik, dan perbaikan kelembagaan bagi masing-masing pelaku sektor keuangan, khususnya agar mampu menciptakan skema pemberdayaan pasca aksesibilitas keuangan diberikan. Semua skema tersebut menjadi syarat untuk mendorong inovasi atas produk dan jasa layanan keuangan yang sesuai dengan karakteristik masyarakat sasaran, sehingga diharapkan mampu mempercepat pemerataan kesejahteraan dalam jangka panjang.

Abstract

Policies to optimize the role of the financial sector in reducing poverty and inequality are often less successful. This is caused by the weak analytical power to map the root causes of poverty. In fact, the role of the financial sector is very much needed in providing accessibility of financial services, especially to the poor. Optimizing the role of the financial sector in creating an inclusive financial model is believed to be able to create equitable distribution of welfare that can last in the long term. Based on this background, this paper aims to explore how the mechanism to optimize the role of the financial sector in accelerating the distribution of welfare. Based on the literature review method, the results of various empirical studies found that optimizing the role of the financial sector should be able to construct the root causes of the depth and severity of poverty. Strategies that can be developed are improving education and financial literacy in rural areas, creating a conducive financial ecosystem, political support, and institutional improvement for each financial sector actor, in particular to be able to create empowerment schemes after financial accessibility is provided. All of these schemes are a requirement to encourage innovation in financial products and services that are in accordance with the characteristics of the target community, so that they are expected to accelerate the distribution of welfare in the long term..

* Lokot Zein Nasution.

© 2021 University of Merdeka Malang All rights reserved.

Peer review under responsibility of University of Merdeka Malang All rights reserved.

1. Pendahuluan

Salah satu permasalahan terberat bagi banyak negara berkembang dalam meningkatkan kualitas pembangunan adalah persoalan tingginya kemiskinan dan timpangnya distribusi pendapatan. Kemiskinan adalah ketidakmampuan masyarakat untuk memberikan pendapatan yang cukup dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, pakaian, transportasi dan pendidikan (Asare *et.al*, 2020). Kemiskinan menurut Brei *et.al*, (2018) adalah situasi pendapatan yang rendah atau pendapatan yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup. Menurut Adeabah (2017), tingginya pertumbuhan ekonomi suatu negara seringkali tidak dapat menjamin pemerataan kesejahteraan akibat kompleksnya persoalan kemiskinan. Dalam banyak kasus, kompleksitas kemiskinan rata-rata disebabkan oleh persoalan sosial, ekonomi, kultural, dan persoalan kebijakan yang kurang tepat sasaran. Sementara menurut Erlando *et.al*, (2020), sulitnya pengentasan kemiskinan disebabkan oleh akar persoalan dengan tipikal kemiskinan yang bersifat struktural. Kegagalan pengentasan kemiskinan seringkali berdampak pada kurang meratanya distribusi kesejahteraan, sehingga tingkat ketimpangan wilayah menjadi tinggi.

Tingginya ketimpangan wilayah menjadikan kualitas pembangunan kurang berjalan secara inklusif. Beragam strategi pengentasan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan sudah banyak dikeluarkan oleh pemerintah, tetapi rata-rata hasil yang didapat dinilai masih bersifat jangka pendek (Claessens, 2007). Arah kebijakan pengentasan kemiskinan dan pemerataan distribusi pendapatan menurut Erlando *et.al*, (2020) disebabkan oleh model kebijakan yang kurang mampu menganalisis akar masalah penyebab kemiskinan, sehingga kebijakan yang dikeluarkan kurang sesuai dengan kebutuhan lapangan. Dampaknya, mayoritas arah kebijakan masih bersifat insentif berbasis bantuan, atau pemberian stimulus yang kurang mampu menggali potensi masyarakat miskin agar mereka sanggup mengoptimalkan potensinya untuk menyelamatkan diri dari kondisi kemiskinan. Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil penelitian Rout & Bag (2020), bahwa kunci bagi pengentasan kemiskinan adalah menggali potensi masyarakat miskin dan menyadarkan mereka pentingnya mengeluarkan potensi sumberdaya melalui kegiatan pemberdayaan.

Salah satu strategi pengentasan kemiskinan berbasis penggalian potensi masyarakat miskin adalah melalui pemberian *trigger* berupa

penyediaan aksesibilitas keuangan untuk menciptakan kegiatan ekonomi produktif. Penguatan sektor keuangan terhadap pengentasan kemiskinan telah lama menjadi gagasan utama oleh berbagai ekonom. Sebagaimana dikemukakan Nsiah *et.al*, (2021), pemberian aksesibilitas keuangan bagi masyarakat miskin dapat berfungsi bagi dua optimalisasi, yaitu: (i) mengoptimalkan akses layanan keuangan untuk peningkatan kualitas kehidupan; dan (ii) mengoptimalkan akses layanan keuangan untuk meningkatkan permodalan sebagai sumber kegiatan ekonomi produktif. Sementara menurut Zhuang *et.al*, (2009), penguatan peran sektor keuangan akan mampu menciptakan skema kegiatan kewirausahaan bagi masyarakat miskin. Hasil penelitian Zia & Prasetyo (2018) menyatakan terdapat hubungan antara penguatan sektor keuangan dan pemerataan kesejahteraan, yang dimediasi oleh adanya insentif untuk meningkatkan kegiatan ekonomi produktif. Ketika produktivitas tumbuh dengan baik, maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat, sehingga penguatan sektor keuangan secara langsung maupun tidak langsung mampu menguatkan pemerataan kesejahteraan.

Banyak pendapat mengemukakan penguatan sistem keuangan mampu menciptakan pemerataan kesejahteraan, namun penjelasannya selama ini dianggap belum terkonstruksi dengan baik. Penguatan sektor keuangan bagi pemerataan kesejahteraan rata-rata belum menjelaskan dampak-dampak yang bisa ditimbulkan dari keunggulan sektor keuangan sehingga belum terekplorasi bagaimana potensi untuk meningkatkan aksesibilitas keuangan bagi rata-rata penduduk miskin. Persoalan eksplorasi mayoritas terletak pada belum tingginya aksesibilitas sektor keuangan bagi mayoritas penduduk miskin, sehingga terjadi disparitas antara kebutuhan aksesibilitas dengan kinerja layanan yang disediakan. Persoalan lain adalah belum terpetakannya beragam variabel sebagai daya penjas antara pengaruh langsung dan tidak langsung antara penguatan sektor keuangan dengan peningkatan kesejahteraan. Kritik yang ditujukan mayoritas berkuat pada kedangkalan peran sektor keuangan yang sebenarnya mempunyai peran signifikan bagi pemerataan kesejahteraan, namun belum digali secara optimal.

Berdasarkan alasan tersebut, maka tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana peranan sektor keuangan mampu mengentaskan kemiskinan dan menciptakan pemerataan kesejahteraan.

Daya eksplorasi dibutuhkan untuk menciptakan konstruksi analisis yang mendalam sehingga mampu menjadi skema konseptual yang sistematis dan mampu diimplementasikan di lapangan.

2. Peranan Sektor Keuangan

Sektor keuangan merupakan bagian dari kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk menciptakan mekanisme penyediaan permintaan dan penawaran atas jasa layanan keuangan (Ellahi *et.al*, 2021). Sektor keuangan juga dipahami sebagai sebuah transmisi dari kebijakan moneter agar terjadi kestabilan hubungan antara harga, uang beredar, dan menjaga kemampuan bank sentral dalam mengendalikan besaran moneter (Inggrid, 2006). Mekanisme kerja dari sektor keuangan sangat bergantung pada transaksi-transaksi dari lembaga keuangan yang memberikan jasa layanan terhadap kelompok permintaan. Dengan peranan lembaga keuangan, maka sektor keuangan mempunyai peran sentral dalam menghubungkan antara permintaan dan penawaran uang dalam bentuk penyediaan jasa layanan keuangan (Paun *et.al*, 2019).

Kegiatan sektor keuangan sangat dibutuhkan dalam mekanisme pembangunan, karena sektor keuangan melibatkan rencana dan implementasi untuk mengintensifkan moneterisasi perekonomian melalui peningkatan akses terhadap lembaga keuangan, transparansi, efisiensi, dan mendorong *rate of return* (Khan *et.al*, 2019). Menurut Paun *et.al* (2019), dampak sektor keuangan terhadap pembangunan dapat dilihat dari peranannya terhadap penyediaan sumber pembiayaan, investasi, dan kegiatan intermediasi. Sektor keuangan yang berkembang dengan baik akan mendorong kinerja pertumbuhan ekonomi, karena penyediaan jasa layanan keuangan mampu meningkatkan intensitas kegiatan ekonomi produktif. Sebaliknya, jika sektor keuangan tidak bekerja secara optimal, maka perekonomian berpotensi mengalami hambatan likuiditas dalam mencapai kinerja pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Menurut Fagbemi & Ajibike (2018), peranan penting sektor keuangan ditekankan melalui konsep fasilitasi dan intermediasi. Sektor keuangan pada dasarnya adalah tatanan dalam perekonomian yang memiliki peran penting dalam menyediakan fasilitas/ jasa di bidang keuangan (*financial services*) dan menyalurkan dana dari pihak yang mempunyai dana (*surplus of funds*), dan pihak yang membutuhkan dana (*lack of funds*) Khan *et.al*,

2019). Sektor keuangan berfungsi dalam menyalurkan dana dari pemberi pinjaman atau penabung yang memiliki kelebihan dana kepada peminjam uang yang membutuhkan dana. Pemberi pinjaman dan peminjam sama-sama mencakup tiga objek, yaitu rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Dengan meningkatkan peranannya, maka sektor keuangan berpotensi mampu menyediakan lapangan kerja secara lebih massif, termasuk peningkatan nilai tambah (*value added*) dan perbaikan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Moudos *et.al*, (2006), konsep peranan penting sektor keuangan dalam perekonomian dapat dijelaskan melalui mekanisme pembentukan aliran dana. Dalam sistem keuangan, aliran dana dapat dilakukan melalui dua cara. Pertama adalah keuangan langsung (*direct finance*), yaitu jika peminjam mengajukan sejumlah pinjaman dana langsung dari pemberi pinjaman melalui pasar uang dengan menjual surat berharga (*securities*) atau dikenal sebagai instrumen keuangan (*financial instrument*) yang merupakan klaim atas pendapatan atau aset milik peminjam. Kedua, melalui keuangan tidak langsung (*indirect finance*), yaitu jika *financial intermediaries* yang berada diantara pemberi pinjaman dan peminjam dan membantu menyalurkan dana dari pemberi pinjaman kepada peminjam. Dalam hubungan ini, *financial intermediaries* meminjam dana dari pemberi pinjaman kemudian menggunakan dana tersebut untuk menyalurkan pinjaman kepada peminjam. Skema langsung dan tidak langsung menjadikan peranan sektor keuangan sangat dibutuhkan bagi perekonomian, dan akan menentukan kualitas pembangunan di masa yang akan datang (Brei *et.al*, 2018).

3. Penentu Kinerja Sektor Keuangan

Pengertian kinerja sektor keuangan adalah bagian dari manajemen kinerja suatu organisasi, yang dalam hal ini organisasi pemerintah selaku pembuat regulasi, dan organisasi masing-masing pelaku sektor keuangan (Zhang *et.al*, 2015). Tinggi rendahnya kinerja sektor keuangan sangat ditentukan oleh berbagai aspek, yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kualitas perekonomian, begitupun dengan kualitas pembangunan. Menurut Zhang *et.al*, (2015), penentu kinerja sektor keuangan dipengaruhi oleh lingkungan internal dan eksternal. Pengertian

lingkungan internal adalah kondisi yang melingkupi tata kelola internal lingkungan sektor keuangan, seperti kapasitas manajemen, tata kelola, ekosistem sektor keuangan, dan regulasi. Sementara itu, pengertian lingkungan eksternal seperti kondisi sosial, makro ekonomi, konstelasi global, dan berbagai lingkungan eksternal lain yang diluar batas kemampuan kontrol masing-masing lembaga keuangan. Menurut Malahimm & Khatib (2018), penentu kinerja sektor keuangan banyak dipengaruhi oleh lingkungan makro ekonomi, struktur pasar keuangan, perpajakan, dan rasio pinjaman terhadap aset. Sementara menurut Zia & Prasetyo (2018), penentu kinerja sektor keuangan banyak dipengaruhi oleh kualitas manajemen tata kelola, sehingga berdampak terhadap inovasi produk jasa layanan keuangan dan berpengaruh signifikan terhadap pendalaman dan inklusi keuangan.

Menurut Zia & Prasetyo (2018), arah dari kinerja sektor keuangan minimal mencakup dua aspek, yaitu: (i) untuk mengoptimalkan peranan sektor moneter bagi perekonomian; dan (ii) menyediakan aksesibilitas keuangan bagi pelaku ekonomi, baik pemerintah, masyarakat, maupun perusahaan. Kedua aspek tersebut mempunyai karakteristik dan arah kinerja yang berbeda. Bagi optimalisasi fungsi moneter, kinerja sektor keuangan harus kompatibel dengan beberapa target moneter, seperti pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, kesempatan kerja, kestabilan harga, dan keseimbangan neraca pembayaran (Erlando *et.al*, 2020). Dalam target-target tersebut, sektor keuangan melalui beragam jenis lembaga penyedia jasa layanan keuangan berfungsi untuk menjalankan peran masing-masing lembaga, baik dari jenis bank maupun nonbank. Sementara bagi penyediaan aksesibilitas keuangan terhadap pelaku ekonomi, peranan sektor keuangan ditekankan pada pentingnya menyediakan beragam akses jasa layanan keuangan, khususnya ditujukan bagi pemerataan kesejahteraan. Dalam peranannya tersebut, sektor keuangan dituntut harus mampu menyediakan akses layanan keuangan terhadap seluruh lapisan masyarakat tanpa kecuali. Peranan tersebut memposisikan lembaga penyedia jasa layanan keuangan sebagai aktor kunci mewujudkan kesejahteraan, pengentasan kemiskinan, dan terciptanya pemerataan kesejahteraan (Yustika & Sulistiani, 2010).

Jika dihubungkan dalam target percepatan pemerataan kesejahteraan, maka peranan sektor keuangan selalu ditekankan pada penyediaan

aksesibilitas keuangan bagi seluruh pelaku ekonomi. Peranan tersebut harus memperhatikan aspek pemerataan, sehingga jasa layanan keuangan harus bisa mencakup seluruh wilayah, khususnya bagi golongan masyarakat miskin. Menurut Malahimm & Khatib (2018), penentu kinerja sektor keuangan banyak dipengaruhi oleh visi lembaga keuangan yang bersangkutan, yakni apakah lembaga keuangan mempunyai visi untuk menyoal golongan masyarakat miskin atau tidak. Sementara menurut Khan *et.al*, (2019), penentu lain dipengaruhi oleh seberapa tinggi inovasi produk dan jasa layanan yang bisa diberikan oleh masing-masing lembaga keuangan, terutama yang mampu menyesuaikan dengan karakteristik masyarakat sasaran. Produk jasa layanan keuangan yang kurang adaptif seringkali menjadikan sektor keuangan terkesan menjadi eksklusif, dan pemerataan kesejahteraan menjadi sulit diwujudkan. Sementara menurut Pereira da Silva *et.al*, (2019) (penentu lain dari kinerja sektor keuangan bagi pemerataan kesejahteraan terletak pada pemerataan sarana prasarana, literasi, dan edukasi yang baik terhadap masyarakat miskin.

Dari beragam penentu kinerja sektor keuangan dalam arah pemerataan kesejahteraan, menurut Brei *et.al*, (2018) dapat dibuat sistematika yang bertahap. Pertama adalah pentingnya melakukan edukasi dan literasi keuangan secara menyeluruh, sehingga faktor tersebut menjadi penentu paling awal terhadap tinggi rendahnya kinerja sektor keuangan. Edukasi dan literasi adalah upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya masyarakat miskin terhadap fungsi aksesibilitas keuangan terhadap pengembangan kegiatan ekonomi produktif. Kedua adalah menciptakan produk dan inovasi jasa layanan keuangan yang *customer centric*, yakni sesuai dengan karakteristik masyarakat sasaran.

4. Persoalan Kemiskinan dan Ketimpangan

Adeabah (2017) menyatakan bahwa faktor penentu kinerja sektor keuangan terhadap pengentasan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan sangat ditentukan oleh dua kondisi, yaitu: (i) kondisi layanan keuangan yang diberikan; dan (ii) kondisi akar masalah penyebab kemiskinan dan ketimpangan. Kondisi layanan keuangan yang diberikan

sangat bergantung pada tata kelola, manajemen, dan komitmen dari masing-masing lembaga keuangan dalam melakukan skema pemberdayaan. Dalam konteks tata kelola, kondisi layanan keuangan merupakan bagian dari ekosistem manajemen strategik dan *good corporate governance* yang dikembangkan oleh masing-masing lembaga keuangan. Sementara dari kondisi penyebab kemiskinan dan ketimpangan, masing-masing lembaga keuangan harus bisa menyesuaikan aspek pelayanan dengan karakteristik masyarakat miskin. Hasil temuan Ellahi *et.al*, (2021) menjelaskan bahwa kesuksesan dari pengentasan kemiskinan dan ketimpangan terletak pada skema kebijakan yang mampu memetakan karakteristik penyebab kemiskinan. Meski demikian, upaya tersebut seringkali diabaikan, sehingga rumusan kebijakan kerap gagal menciptakan pemerataan kesejahteraan yang bisa bertahan dalam jangka panjang.

Dari uraian di atas, Manshor *et.al*, (2020) mengusulkan pentingnya memetakan karakteristik penyebab kemiskinan dan ketimpangan sebagai bagian penting dari penentu keberhasilan atas kebijakan sektor keuangan. Secara harfiah, kemiskinan adalah kekurangan sumberdaya dan pendapatan (Asare, *et.al*, 2020). Dalam bentuk yang ekstrem, kemiskinan adalah kurangnya akses kebutuhan manusia untuk mempertahankan efisiensi kerja yang berguna seperti makanan, sandang, perumahan, air bersih, dan pelayanan kesehatan (Asrol & Ahmad, 2018). Sementara itu, Bhattacharyya (2012) mengkonstruksi definisi kemiskinan sebagai fenomena kompleks yang umumnya mengacu pada ketidakcukupan sumberdaya dan perampasan pilihan yang memungkinkan orang untuk menikmati kondisi kehidupan yang layak. Kemiskinan juga dimaknai sebagai pengingkaran terhadap hak asasi manusia yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Beberapa pendapat merangkum kemiskinan sebagai sebuah kondisi kelaparan, kekurangan tempat tinggal, tidak mampu mengakses pendidikan, kesehatan, air bersih, layanan publik, dan aspek lain yang bersifat multidimensi dengan hubungan yang interaktif dan kausal yang kompleks antar dimensi. Menurut Addae & Jorankye (2014), masyarakat miskin seringkali kekurangan akses ke sektor keuangan dan rendahnya peluang untuk memperoleh pendapatan.

Pendapat lain seperti dikemukakan Bhattacharyya (2012) yang

menyatakan bahwa kemiskinan baik secara relatif maupun absolut mengacu pada keadaan dimana seseorang tidak mampu memenuhi atau menyediakan cukup untuk kebutuhannya atau kebutuhan dasar manusia. Akar masalah tersebut disebabkan oleh beragam kasus, seperti rendahnya akses kepada pekerjaan produktif, kurangnya keterampilan, rendahnya kualitas sumberdaya manusia, rendahnya tingkat pendidikan, dan rendahnya ilmu pengetahuan sehingga membatasi mereka masuk ke infrastruktur ekonomi dan sosial. Menurut Addae & Jorankye (2014), rendahnya aksesibilitas masyarakat miskin akan menghalangi mereka untuk maju dalam kesejahteraan yang dibatasi oleh ketersediaan infrastruktur ekonomi dan sosial. Dalam kasus tersebut, kemiskinan diposisikan sebagai struktur pemisahan dari masyarakat dan kelompok tanpa penerimaan dalam pengaturan produktif. Kasus yang sering dicontohkan adalah kemiskinan bukan hanya menyangkut rendahnya akses pangan, namun juga masyarakat miskin sulit dalam melakukan cocok tanam, sehingga kurang bisa merubah status kemiskinan melalui kegiatan ekonomi produktif.

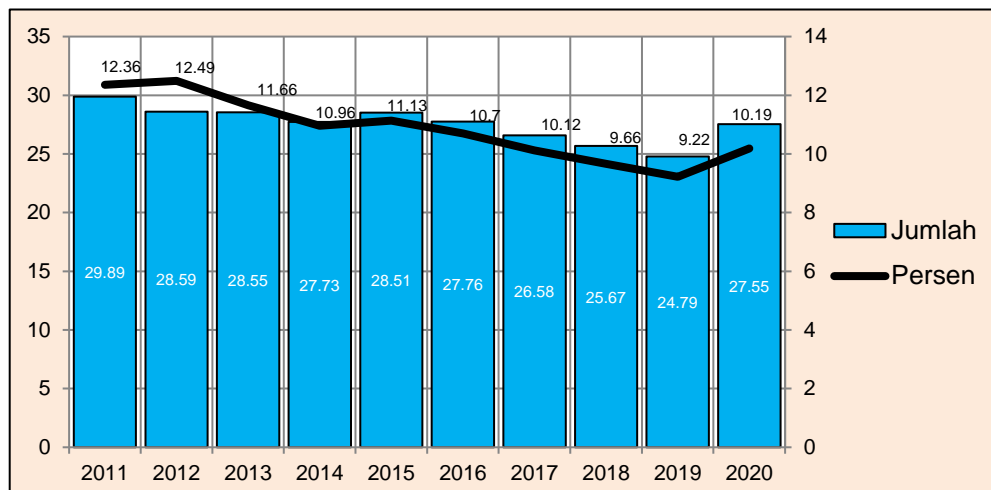
Persoalan kemiskinan berdampak secara langsung terhadap tingkat ketimpangan, yaitu disparitas pendapatan atau kesejahteraan antara golongan kaya dan miskin dalam suatu wilayah. Dalam banyak kasus, sentra untuk menciptakan tingkat pendapatan masyarakat yang tinggi mayoritas berada di perkotaan, sementara sentra kemiskinan mayoritas berada di perdesaan. Persoalan kemiskinan dan ketimpangan telah menjadi isu utama dalam beragam diskusi baik skala nasional maupun internasional, terutama di antara negara-negara berkembang. Akar persoalan ketimpangan rata-rata bersumber dari seberapa besar tingkat keparahan dan kedalaman kemiskinan yang dilihat dari perspektif multidimensi. Dalam banyak kasus, kemiskinan di tingkat individu dan rumah tangga sangat berkorelasi dengan tingkat keparahan kemiskinan. Tingginya tingkat keparahan kemiskinan berdampak pada disparitas kesejahteraan antar wilayah. Pendapat dari Bhattacharyya (2012) menjelaskan bahwa akar persoalan ketimpangan adalah disparitas yang tinggi atas kondisi dimana masyarakat hampir tidak dapat bertahan hidup pada tingkat subsisten, ditambah dengan terbatasnya akses terhadap kebutuhan faktor fisiologis dalam mempertahankan hidup.

5. Kondisi Kemiskinan dan Ketimpangan di Indonesia

Penjelasan sebelumnya sudah menerangkan bahwa persoalan kemiskinan dan kompleksitas problem ketimpangan menyebabkan faktor-faktor penentu kinerja sektor keuangan kurang berjalan secara optimal. Langkah yang harus dilakukan adalah pentingnya memetakan karakteristik dan akar masalah penyebab kemiskinan dan ketimpangan. Kasus di Indonesia, kemiskinan dan ketimpangan sudah menjadi persoalan yang mampu mereduksi secara signifikan terhadap kualitas hasil pembangunan. Sebelum mengulas konstruksi peran sektor keuangan bagi percepatan pemerataan kesejahteraan, maka terlebih dahulu akan dibahas mengenai kondisi dan karakteristik kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia. Ulasan tersebut sangat diperlukan sebagai bahan dan informasi untuk mengkonstruksi analisis peran sektor keuangan bagi percepatan pemerataan kesejahteraan.

Pada dasarnya, perkembangan tingkat kemiskinan di Indonesia relatif terus mengalami penurunan. Dari sisi jumlah, angka kemiskinan pada tahun 2011 masih sebesar 29,89 juta orang, kemudian pada tahun 2019 berhasil menurun menjadi 24,79 juta orang. Hanya saja, pada tahun 2020 kembali meningkat akibat pandemi Covid-19 menjadi 27,55 juta orang. Selama kurun waktu tahun 2011-2019 (kondisi normal tanpa pandemi), angka kemiskinan berhasil diturunkan menjadi 5,1 juta orang, atau yang berarti bahwa dalam satu tahun rata-rata terdapat pengurangan kemiskinan sebesar 0,56 juta orang. Dari sisi persentase, jumlah penduduk miskin pada tahun 2011 sebesar 12,36 persen, dan tahun 2019 berhasil turun menjadi 9,22 persen. Selama kurun waktu tersebut, telah terjadi penurunan persentase kemiskinan sebesar 3,14 persen atau rata-rata per tahun penurunannya sebesar 0,34 persen.

Gambar 01. Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Indonesia



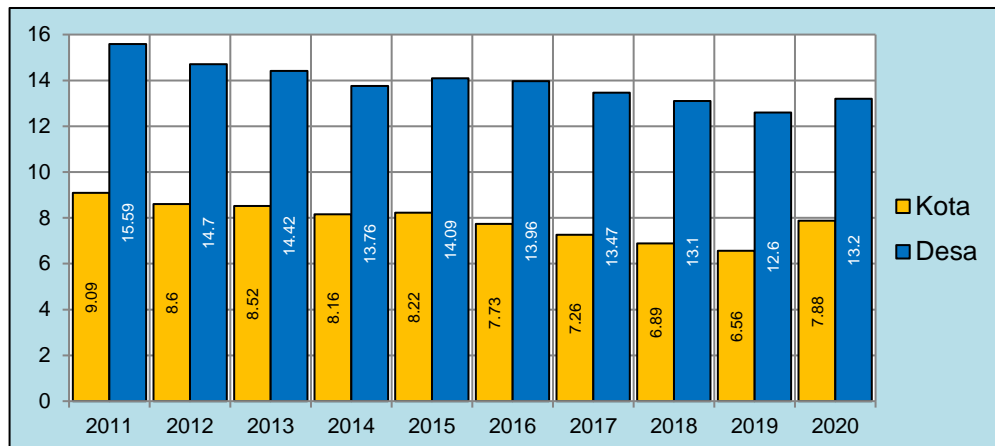
Sumber: BPS (Diolah)

Beragam program kemiskinan berbasis aksesibilitas keuangan sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh pemerintah, seperti KIK (Kredit Industri Kecil), KUT (Kredit Usaha Tani), Kredit Bimas (Bimbingan Massal), dan beragam program penyediaan aksesibilitas keuangan lainnya. Namun, beragam program pengentasan kemiskinan yang sudah dikeluarkan menurut Ingrid (2006) relatif masih mempunyai beban biaya (*cost*) yang lebih tinggi dan tingkat keberhasilan yang relatif rendah, sehingga penurunan kemiskinan masih dinilai belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari masih tingginya konsentrasi kemiskinan di perdesaan. Selama kurun waktu tahun 2011-2020, rata-rata tingkat persentase kemiskinan per tahun di perdesaan sebesar 13,88 persen, jauh di atas rata-rata perkotaan yang sebesar 7,89 persen (BPS, 2021). Disparitas tersebut selama bertahun-tahun relatif dengan perbedaan yang mencolok. Artinya, ketimpangan kemiskinan di Indonesia relatif mencolok, dan terdapat tendensi kurang optimalnya program penurunan kemiskinan khususnya di perdesaan.

Selain perkembangan di atas, angka kedalaman dan keparahan kemiskinan di Indonesia sebenarnya relatif masih stagnan dan belum mengalami penurunan yang berarti. Indeks kedalaman kemiskinan adalah seberapa jauh perbedaan pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sementara indeks keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di suatu wilayah relatif terhadap

pengeluaran rata-rata kelompok miskin dalam satu wilayah yang sama. Pada tahun 2011, indeks kedalaman kemiskinan rata-rata per tahun sebesar 1,78, dan rata-rata indeks keparahan kemiskinan per tahun sebesar 0,46. Pada tahun 2011, indeks kedalaman kemiskinan sebesar 2,05 dan tahun 2019 (kondisi normal tanpa pandemi) sebesar 1,5. Sementara untuk indeks keparahan kemiskinan, pada tahun 2011 sebesar 0,55 dan tahun 2019 menjadi 0,36 (BPS, 2021). Selama kurun waktu tersebut, baik kedalaman maupun keparahan kemiskinan relatif bersifat naik turun dan belum terdapat penurunan secara konsisten. Data tersebut menguatkan pernyataan sebelumnya bahwa program pengentasan kemiskinan masih belum optimal akibat *opportunity cost* yang ditanggung masih relatif tinggi.

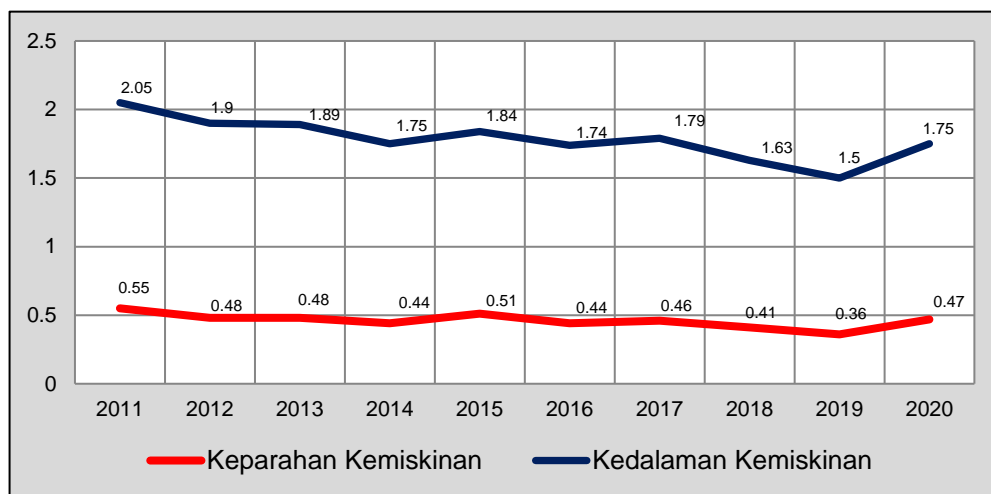
Gambar 02. Perkembangan Kemiskinan Desa dan Kota di Indonesia



Sumber: BPS (Diolah)

Dari sisi disparitas desa dan kota, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan juga sama-sama bersifat timpang, yakni masih terkonsentrasi tinggi di perdesaan. Pada tahun 2011, indeks kedalaman kemiskinan di perkotaan sebesar 1,48, dibandingkan dengan perdesaan yang mencapai 2,61. Begitupun pada tahun 2020, dimana indeks kedalaman kemiskinan di perkotaan sebesar 1,26 dan di perdesaan masih sebesar 2,39 persen. Selama kurun waktu tersebut, rata-rata indeks kedalaman kemiskinan perkotaan sebesar 1,26, dan di perdesaan rata-rata mencapai 2,36 (BPS, 2021). Data tersebut mencerminkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di perdesaan masih jauh dari garis kemiskinan. Artinya, semakin banyak penduduk yang terus mengalami kemiskinan di perdesaan.

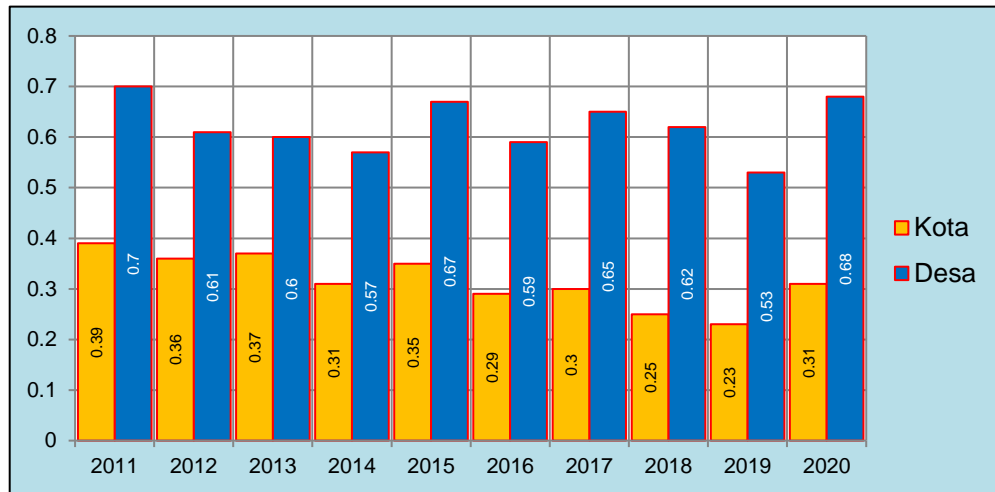
Gambar 03. Perkembangan Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan di Indonesia



Sumber: BPS (Diolah)

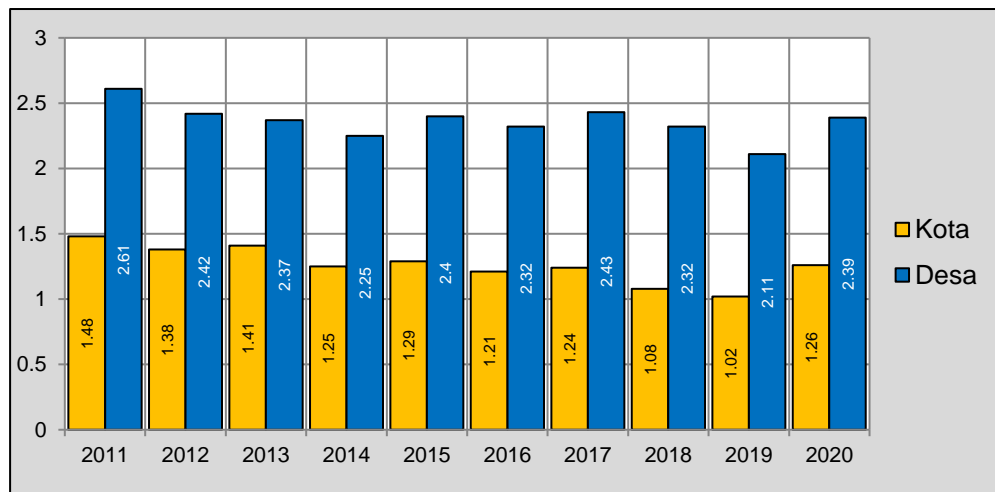
Hal serupa juga terjadi pada indeks keparahan kemiskinan, dimana selama kurun waktu tahun 2011-2020, rata-rata di perkotaan sebesar 0,31, dibandingkan dengan rata-rata perdesaan yang mencapai 0,62. Data tersebut mencerminkan bahwa keparahan kemiskinan di perdesaan masih terjadi, sehingga karakteristik kemiskinan pada dasarnya bersifat kompleks dan sulit dientaskan. Sementara itu, indeks kedalaman kemiskinan antara perkotaan dan perdesaan juga mempunyai karakteristik yang sama. Selama kurun waktu tahun 2011-2020, rata-rata indeks kedalaman kemiskinan perkotaan sebesar 1,26, sementara untuk perdesaan mencapai 2,36. Menurut Asrol & Ahmad (2018), masih tingginya kemiskinan di perdesaan akibat model kebijakan yang masih berbasis bantuan konsumtif, belum menuju insentif dalam mendorong kegiatan ekonomi produktif. Penyediaan aksesibilitas keuangan juga seringkali gagal akibat kurang terpetakannya akar masalah penyebab kemiskinan, disamping tidak terdapatnya mekanisme pemberdayaan pasca kredit diberikan.

Gambar 04. Perkembangan Indeks Keperahan Kemiskinan Desa dan Kota



Sumber: BPS (Diolah)

Gambar 05. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Desa dan Kota



Sumber: BPS (Diolah)

6. Optimalisasi Peran Sektor Keuangan bagi Percepatan Pemerataan Kesejahteraan

Beragam penjelasan sebelumnya sudah menerangkan bahwa terdapat faktor-faktor penentu kinerja sektor keuangan. Kinerja tersebut seringkali tidak berjalan optimal akibat kurangnya analisis akar masalah penyebab ketimpangan dan pemerataan, sehingga kebijakan aksesibilitas keuangan kurang bisa mampu menciptakan percepatan pemerataan kesejahteraan.

Terdapat beberapa tendensi bahwa peran sektor keuangan kurang bisa diterapkan sesuai dengan konsep yang ideal. Menurut Adeabah (2017), penerapan peranan sektor keuangan harus ditekankan pada akses masyarakat terhadap layanan keuangan, sehingga dapat meningkatkan kapasitas dan kemandirian ekonomi dan pada akhirnya memberikan jalan keluar dari masalah kemiskinan dan kesenjangan ekonomi. Sasaran penyediaan aksesibilitas keuangan difokuskan pada masyarakat yang belum terpenuhi oleh layanan keuangan formal, yaitu masyarakat miskin, UMKM, dan masyarakat lintas golongan (Pereira da Silva *et.al*, 2019).

Sasaran penyediaan aksesibilitas keuangan harus difokuskan pada pemetaan akar masalah penyebab kemiskinan, yang diduga banyak berasal dari model kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural mayoritas bersumber dari kompleksitas permasalahan sosial. Oleh karena itu, orientasi dari peningkatan peran sektor keuangan harus ditujukan pada efisiensi ekonomi, mendukung stabilitas sistem keuangan, mendukung pendalaman pasar uang, menyediakan pasar baru yang potensial bagi lembaga keuangan baik perbankan maupun non bank, dan berkontribusi positif terhadap pembangunan daerah yang berkelanjutan (Zia & Prestyo, 2018). Beragam dimensi perbaikan penyediaan aksesibilitas keuangan banyak diyakini mampu mengurai rumitnya pengentasan kemiskinan struktural. Perbaikan berbagai dimensi menurut Pereira da Silva *et.al*, (2019) lebih baik diprioritaskan pada rekonstruksi kelembagaan untuk menciptakan sistem keuangan yang inklusif. Inklusi keuangan adalah hak setiap orang untuk dapat memperoleh akses dan layanan penuh dari lembaga keuangan secara tepat waktu, nyaman, informatif, dan terjangkau dengan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabatnya (Adeabah, 2017).

Program inklusi keuangan merupakan konsep sistem keuangan yang tidak hanya muncul sebagai program yang mendorong tercapainya pertumbuhan ekonomi (*pro-growth*), tetapi juga pro penyerapan lapangan kerja dan bermanfaat bagi masyarakat miskin. Hal ini menyiratkan bahwa optimalisasi peran sektor keuangan harus disinergikan dengan kegiatan literasi dan edukasi keuangan, yang dibarengi dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin. Literasi dan edukasi keuangan seringkali dilupakan oleh berbagai pembuat kebijakan, terutama oleh masing-masing lembaga keuangan. Kasus di Indonesia, diseminasi atas

edukasi dan literasi dapat dioptimalkan melalui lembaga otoritas seperti Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia (BI). Dalam konstelasi pembuat regulasi, Yustika & Sulistiani (2010) mengusulkan pentingnya mengoptimalkan peran dan fungsi badan supervisi. Kegiatan edukasi dan literasi keuangan yang diperkuat dengan badan pengawas (supervisi) bagi penyediaan aksesibilitas keuangan mutlak harus dibarengi dengan penyediaan layanan pemberdayaan. Tujuan utamanya bukan saja mengurangi kemiskinan atau meningkatkan rasio akses terhadap lembaga keuangan, tetapi juga mencapai ekonomi berkelanjutan dimana mereka dapat mengelola keuangannya secara mandiri dan meningkatkan pendapatannya.

Tahap selanjutnya adalah memperbaiki iklim atau ekosistem sektor keuangan domestik. Selama ini, tingkat kompetisi penyedia aksesibilitas jasa layanan keuangan pada dasarnya sangat tinggi. Hal ini diperkuat oleh pendapat Adeabah (2017), bahwa persoalan belum optimalnya peran sektor keuangan di banyak negara berkembang disebabkan oleh masih tingginya biaya aksesibilitas keuangan yang dibebankan oleh masing-masing lembaga keuangan akibat tingginya kompetisi antar lembaga keuangan. Menurut Maudos *et.al*, (2006), analisis kompetisi pasar sangat penting karena selama ini biaya intermediasi keuangan masih sangat tinggi dan volume tabungan dan investasi yang masih rendah, sehingga masih menciptakan sistem keuangan yang eksklusif. Lembaga keuangan dihadapkan pada tingginya biaya sosial (*social cost*) akibat rendahnya kapasitas dan pengetahuan tata cara melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat. Dalam kasus tersebut, harus terdapat kebijakan yang menyatakan bahwa pembuat kebijakan tidak boleh berlebihan dalam meluncurkan kebijakan persaingan karena dapat menghasilkan konsekuensi yang tidak diinginkan dengan mengacaukan sistem keuangan (Brei *et.al*, 2018).

Strategi perbaikan ekosistem keuangan juga pernah diutarakan Claessens (2007), yang menyatakan pentingnya akses keuangan berbasis kesetaraan, sehingga setiap lembaga keuangan dituntut mampu menurunkan beban biaya penyediaan jasa layanan keuangan. Literatur tentang pembangunan keuangan sebagian besar membahas bagaimana ukuran sektor keuangan mempengaruhi pertumbuhan, dan baru-baru ini menekankan pentingnya untuk memperhatikan distribusi akses

keuangan. Bukti terbaru dari Asare *et.al*, (2020) menunjukkan bahwa pembangunan ekosistem keuangan berbasis kesetaraan dapat membantu mengurangi ketidaksetaraan dan sangat penting untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan individu.

Perubahan paradigma masing-masing lembaga keuangan selain harus berbasis kesetaraan, perbaikan lainnya adalah pentingnya dukungan politik dalam membangun ekosistem keuangan yang kondusif. Menurut Ellahi *et.al*, (2021), ketimpangan mempengaruhi pembangunan keuangan, dan khususnya distribusi akses, karena yang tidak setara terhadap sumber daya mempengaruhi kekuatan politik *de facto*. Kasus empiris banyak menyimpulkan bahwa di negara-negara dengan ketidaksetaraan tinggi, jalur reformasi mungkin perlu dilakukan secara bertahap, yang ditujukan secara eksplisit untuk mengurangi ketimpangan akses dan pentingnya membentuk lembaga pengawasan. Hanya dengan demikian reformasi diharapkan dapat meningkatkan akses keuangan, mencegah oportuniste, dan mengarah pada pembangunan keuangan yang berkelanjutan secara merata. Tujuan tersebut sesuai dengan orientasi keuangan sebagaimana dikemukakan Asare *et.al*, (2020), bahwa inklusi keuangan harus ditempatkan sebagai penyampaian layanan keuangan yang tepat waktu kepada bagian masyarakat yang kurang beruntung.

Optimalisasi peran sektor keuangan bagi percepatan pemerataan kesejahteraan juga dikemukakan Zhuang *et.al*, (2009) melalui strategi penciptaan inovasi produk dan jasa layanan keuangan secara merata. Inovasi yang dilakukan terutama ditekankan pada metode tabungan, kredit, metode pembayaran, dan manajemen risiko. Strategi tersebut muncul karena mayoritas masyarakat miskin *non bankable* tidak memiliki rekening menghadapi biaya hidup yang tinggi, adanya jarak, dokumentasi/rekam jejak transaksi, dan hambatan lainnya. Hal ini selalu ditekankan karena inefisiensi yang menghambat pertumbuhan ekonomi dan peningkatan jumlah kemiskinan secara tidak langsung rata-rata akibat aksesibilitas keuangan yang tidak merata. Perlunya inovasi diperkuat oleh Brei *et.al*, (2018) bahwa optimalisasi peranan sektor keuangan harus meningkatkan pertumbuhan dengan mengoptimalkan efisiensi alokasi modal dan dengan mengurangi kendala pinjaman.

Gagasan dalam mengoptimalkan peran sektor keuangan juga disampaikan oleh Nsiah *et.al*, (2021) melalui pentingnya mekanisme

pemberdayaan pasca pinjaman diberikan kepada masyarakat miskin. Memiliki akses ke layanan keuangan juga harus dilakukan kegiatan memberdayakan masyarakat miskin untuk menabung dan meminjam, membantu mereka memperoleh aset, berinvestasi dalam pendidikan, dan mendirikan bisnis produktif yang memungkinkan mereka meningkatkan standar hidup. Pemberdayaan setidaknya mencakup (Nsiah *et.al*, 2021): (i) edukasi dan literasi keuangan; (ii) pembinaan dan pendampingan usaha; dan (iii) fasilitasi dengan akses sumberdaya, terutama input bahan baku dan pemasaran. Selama ini, sektor keuangan dinilai belum memberikan hasil yang diperlukan sebagian karena efek produk keuangan pada pengurangan kemiskinan sebagian besar belum terlaksana. Sebagian masyarakat terkadang takut menggunakan produk keuangan tertentu seperti pinjaman. Menurut Zhuang *et.al*, (2009), beberapa perusahaan kredit mikro telah mengecewakan orang miskin karena mereka berhasil memanfaatkan debitur untuk mengumpulkan kekayaan bagi diri mereka sendiri. Mekanisme pemberdayaan harus dilakukan dengan basis perbaikan kelembagaan, yang diyakini sebagai faktor kunci keberhasilan mewujudkan percepatan pemerataan kesejahteraan.

7. Penutup

Tulisan ini menyimpulkan pentingnya analisis akar masalah penyebab kemiskinan dan ketimpangan sebagai tahap awal dalam mengoptimalkan peranan sektor keuangan. Peranan sektor keuangan kemudian dioptimalkan melalui pentingnya literasi dan edukasi keuangan, terutama ditujukan pada masyarakat miskin perdesaan. Tujuan utamanya adalah meningkatkan pengetahuan masyarakat miskin akibat masih tingginya indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan di perdesaan. Hasil analisis berbasis literature review juga menyimpulkan bahwa banyak kasus kemiskinan dan ketimpangan di perdesaan disebabkan oleh gagalnya aksesibilitas keuangan yang mampu meningkatkan daya produktivitas masyarakat miskin. Tahap tersebut kemudian dapat dioptimalkan dengan memperbaiki ekosistem keuangan untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas penyediaan jasa layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat miskin.

Hasil analisis menekankan pentingnya mekanisme pemberdayaan

untuk memperluas atau memperdalam layanan keuangan, yang diharapkan mampu mendorong akses untuk mengentaskan kemiskinan. Pemberdayaan minimal mencakup intensitas pembinaan dan pendampingan, dan fasilitasi aksesibilitas sumberdaya baik input produksi maupun pemasaran. Dengan skema pemberdayaan, akses terhadap jasa layanan keuangan dapat mendukung kelompok miskin dalam menjalankan kegiatan usaha untuk memulai bisnis secara mandiri. Selain itu dapat memperluas sumber daya manusia untuk mendorong mereka keluar dari kondisi kemiskinan. Luasnya layanan keuangan berbasis pemberdayaan dapat menciptakan inovasi produk layanan keuangan yang *customer centric*. Dalam hal ini, produk sektor keuangan harus bisa dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Setelah semua tahapan di atas dilalui, maka langkah berikutnya adalah pentingnya menciptakan inovasi dari produk jasa layanan keuangan yang harus terdiversifikasi agar dapat dijangkau oleh keinginan masyarakat. Inovasi produk jasa layanan keuangan diperlukan untuk mewujudkan pendalaman sektor keuangan. Hal ini bertujuan untuk mendekatkan produk jasa layanan keuangan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, khususnya kalangan miskin. Selanjutnya adalah mekanisme evaluasi, kontrol, dan pengawasan yang harus dilakukan oleh lembaga keuangan. Dalam skema tersebut, mekanisme evaluasi mutlak diperlukan karena orientasi akses layanan keuangan bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan berbasis kegiatan ekonomi produktif. Beragam mekanisme tersebut dapat diperkuat dengan pengaturan kelembagaan terhadap masing-masing lembaga keuangan, yang diyakini menjadi salah satu kunci sukses dalam mewujudkan percepatan pemerataan kesejahteraan.

Daftar Pustaka

- Addae, A., & Jorankye. 2014. Causes of poverty in africa: a review of literature. *American International Journal of Social Science*, Vol. 3, No. 7, pp. 147-115.
- Adeabah, D. 2017. Cost efficiency and welfare performance of banks: evidence from an emerging market. *International Journal of Managerial Finance*, pp. 1-42.
- Asare, P., Sackey, V., & Hongli, J. 2020. Financial inclusion and poverty alleviation: the contribution of commercial banks in west africa.

- International Journal of Business, Economics and Management*, Vol. 7, No. 1, pp. 57-70.
- Asrol, A., & Ahmad, H. 2018. Analysis of factors that affect poverty in indonesia. *Espacios*, Vol. 39, Np. 45, pp. 14-25.
- Bhattacharyya, S. 2012. The historical origins of poverty in developing countries. *Munich Personal Repec Archive*, No. 67902.
- BPS (Badan Pusat Statistik). 2021. *Data dan Informasi Kemiskinan Ketimpangan*. Badan Pusat Statistik: Jakarta.
- Brei, M., Ferri, G., & Gambacorta, L. 2018. Financial structure and income inequality. *BIS Working Paper*, No, 756, pp. 01-39.
- Claessens, S. 2007. Finance and inequality: channles and evidence. *Journal of Comparative Economics*, pp. 01-42.
- Ellahi, N., Kiani, A., Awais, M., Affandi, H., Saghir, R., & Qaim, S. 2021. Investigating the institutional determinants of financial development: empirical evidence from saarc countries. *SAGE Open*, Vol. 3, No. 2, pp. 01-12.
- Erlando, A., Riyanto, F.D., & Masakazu, S. 2020. Financial inclusion, economic growth, and poverty alleviation: evidence from eastern indonesia. *Heliyon*, Vol. 6, pp. 01-13.
- Fagbemi, F., & Ajibike, J.O. 2018. Institutional qualityand financial sector development: empirical evidence from nigeria. *American journal of Business and Management*, Vol. 7, No. 1, pp. 01-13.
- Inggrid. 2006. Sektor keuangan dan pertumbuhan ekonomi di indonesia: pendekatan kausalitas dalam multivariate vector error correction model (vecm). *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol. 8, No. 1, pp. 41-50.
- Khan, M.A., Kong, D., Xiang, J., & Zhang, J. 2019. Impact of institutional quality on financial development: cross-country evidence based on emerging and growth-leading economies. *Emerging Markets Finance & Trade*, Vol. 4, No. 8, pp. 01-17.
- Malahimm, S.S.M., & Khatib, A.Y. 2018. Determinants of financial performance for the banks sector in jordan. *Innovare Journal of Business Management*, Vol. 6, 13-24.
- Manshor, Z., Abdullah, S., & Hamed, A.B. 2020. Poverty and the sosial problems. *Academic Research in Business & Social Sciences*, Vol. 10, No. 3, pp. 614-617.
- Moudos, J., Guevara, F., & Juan. 2006. The cost of market power in banking: social welfare loss cv. inefficiency cost. *MPRA Paper*, No. 15253.
- Nsiah, A.Y., Yusif, H., Tweneboah, G., Agyei, K., & Baidoo, A.T. 2021. The effect of financial inclusion on poverty reduction in sub-sahara africa:

- does threshold matter?. *Politics & International Relations*, pp. 01-17.
- Paun, C.V., Musetescu, R.C., Topan, V.M., & Danuletiu, D.C. 2019. The impact of financial sector development and sophistication on sustainable economic growth. *Sustainability*, Vol. 11, No. 2, pp. 01-21.
- Pereira da Silva, A.P., Frost, J., & Gambacorta, L. 2019. Welfare implications of digital financial innovation. *Bank for International Settlements*, 01-08.
- Rout, N., & Bag. 2020. Role of financial inclusion in poverty alleviation in odisha. *Indian Journal of Economics and Development*, Vol. 8, No. 2, pp. 01-09.
- Yustika, A.E., & Sulistiani, E.H. 2010. Kebijakan moneter, sektor perbankan, dan peran badan supervisi. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 14, No. 3, pp. 447-458.
- Zhang., Nouman, M.K., & Muhammad. 2015. Determinants of financial performance of financial sectors (an assessment through economic value added). *Munich Personal Repec Archive*, No. 81659.
- Zhuang, J., Gunatilake, H., & Niimi, Y. 2009. Financial sector development, economic growth, and poverty reduction: a literature review. *Asian Development Bank*, pp. 01-32.
- Zia, I.Z., & Prasetyo, P.E. 2018. Analysis of financial inclusion toward poverty and income inequality. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan*, Vol. 19, No. 1, pp. 114-125.